

Apakah Agama Hindu Bali Modern Lahir dari Tantangan Pancasila dan Islam?*

Nyoman Wijaya

Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana

Email: iwijayatsp@yahoo.co.id

Abstract

The existence of Hinduism in Bali and generally in Indonesia gained recognition by the state as the official religion through a complicated process. This article will answer the question in the title above to see *pemaskaraan* (polishing) process and replicate the Balinese religion. The purpose of *pemaskaraan* (polishing) in order to enhance his form of religion and culture in order to look more beautiful than the original. *Pemaskaraan* (polishing) process is detected when the organic intellectuals manage their fear of the religions of non-Hindu in an effort to maintain the authenticity of Bali. *Pemaskaraan* (polishing) Balinese religion, emerged as organic intellectuals reaction against the widespread threats of religious conversion in Bali. *Pemaskaraan* (polishing) realized by smoothing the basis of the Hindu religion. And replication is the impersonation of religion of the majority, so the Balinese religion is not alienated in the society of nation and state.

Keywords: Hinduism, organic intellectual, Pancasila, Islam, political culture

* Makalah dibawakan dalam seminar “Kemerdekaan dan perubahan jati diri: *An International Conference on Postcolonial Indonesian identity*, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 14-15 Januari 2010, diselenggarakan bersama oleh Jurusan Sejarah UGM, Institut Sejarah Indonesia, Leiden Universiteit, dan Australian National University.

Latar Belakang

Sebelum penaklukan Bali oleh Majapahit tahun 1343, agama Bali tidak disebut sebagai agama Hindu. Nama-nama atau aliran agama yang pernah muncul di Bali mulai abad abad ke-7 adalah Çiwa, Buddha, Çiwa-Buddha, Wisnu, agama Buddha aliran Tantrisme. Walaupun dalam setiap zaman ada aliran dominan —karena menjadi agama penguasa—, namun aliran-aliran lain pada umumnya masih bertahan. Setelah Bali dikuasai oleh Majapahit, semua aliran agama berada di bawah hegemoni agama Çiwa Siddhanta.¹

Sekarang ini agama Bali lebih dikenal sebagai Hindu, tepatnya Hindu Dharma. Kapan dan bagaimana proses agama Bali bisa bernama Hindu, baik Hindu Bali maupun Bali Hindu? Dengan mengutip David Gellner, Howe berpendapat sejak tahun 1920-an intelektual Bali dan kaum reformis meneriakan Hinduisasi agama Bali. Sejak itu, menurut Howe upaya penyamaan antara Hinduisme India dan agama Bali menjadi lebih tegas, disengaja, penuh dengan keberanian, dan gagasan baru dari India diperkenalkan untuk menggabungkan proses ini. Howe menggambarkan filsafat agama Hindu sebagai gagasan membangkitkan kembali neo-Hindu yang muncul pada abad XIX (Howe, 2001:129). Howe menekankan kebangkitan itu pada reformasi, karya sosial, dan spritualitas, keselamatan pribadi, rasionalisme dan menentang upacara, hierarki, dan sihir. Howe lebih jauh mengatakan, kebangkitan itu terlihat ketika *Bhagawadgita* dijadikan sebagai kunci naskah agama, yang dapat berdiri sejajar dengan Injil. Atas dasar interpretasi ini, Howe menyebutkan bahwa agama Hindu yang di zaman sekarang ini yang diuraikan dan dijelaskan dalam

1 Lihat Gora Sirikan, *Pulau Bali dalam Masa-Masa yang Lampau*, Jilid I (Gianyar: Tanpa Penerbit, 1956), Sartono Kartodirdjo, *et al.*, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid II*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), dan N. D, Pandit Shastri, *Sejarah Bali Dwipa, Jilid I* (Denpasar: Bhuvana Saraswati, 1963).

berbagai buku brosur dan dijual di toko-toko buku maupun pasar adalah sebuah agama baru (Howe, 2001:129).

Studi ini akan mencoba menjawab pertanyaan dalam judul di atas dengan melihat proses pemaskaraan dan replikasi agama Bali. Pemaskaraan adalah pelentikkan budaya supaya wujudnya kelihatan menjadi lebih indah dari aslinya. Proses pemaskaraan terlihat ketika para intelektual organik mengelola ketakutan mereka terhadap agama-agama non-Hindu dalam upaya *mengajegkan* Bali. Pemaskaraan agama Bali, muncul sebagai reaksi para intelektual organik terhadap semakin meluasnya ancaman konversi agama di Bali. Pemaskaraan dilakukan dengan cara memperhalus dasar agama Hindu. Sementara, replikasi adalah peniruan identitas agama kelompok mayoritas, supaya agama Bali tidak terasing dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara.

Kedua konsep itu dirangkai dengan konsep artikulasi yang diambil dari pendapat Laclau dan Mark Hobart, yang menerjemahkan artikulasi bukan hanya sebatas mengucapkan sesuatu, tetapi juga upaya menghubungkan dua bagian yang terpisah, melalui pertalian khusus yang tidak permanen; yang di dalamnya tersembunyi hegemoni untuk mengartikulasikan struktur, masyarakat, politik, namun pada akhirnya diruntuhkan oleh perlawanan-perlawanan terhadapnya, melalui disartikulasi (Laclau, 1990:28; Hobart, 2000:17).

Proses Pemaskaraan Agama Bali

“Struktur Dalam” agama Bali adalah pemujaan kepada roh nenek moyang dan bagian-bagian kekuatan alam semesta seperti air, tanah, langit, udara, dan api, yang sudah mengalami proses osmosis menjadi dewa-dewa, yang namanya disesuaikan dengan nama-nama dewa Hindu.² Setelah berhadapan dengan

2 Menurut Claire Holt, proses *osmosis* terjadi ketika para pendeta Hindu menghini-

tantangan eksternal dari agama-agama non-Hindu, sejumlah intelektual organik kemudian memaskarai dasar agama Bali, dengan cara menggandengkannya dengan nama Hindu, supaya tampak lebih bermartabat di tengah-tengah pergaulan hidup keagamaan modern. Pemaskaraan itu berhasil menemukan identitas kebalian yang berlandaskan kehinduan, padahal kenyataannya kebalian bukan kehinduan dan sebaliknya, kehinduan bukan kebalian.

Kesadaran para intelektual organik terhadap perbedaan antara kehinduan dan kebalian tampak dari adanya penolakan terhadap penamaan agama Hindu untuk menamai agama Bali. Penggunaan nama Hindu tampak jelas dari anggaran dasar organisasi Santi yang berbunyi “meneguhkan” agama Hindu. Ada pihak yang tidak sepakat dengan penamaan itu, karena istilah Hindu sifatnya sangat umum, sehingga harus diganti supaya lebih spesifik menjadi Hindu Bali,³ namun ada pula yang menghendaki nama Bali Hindu. Bali Hindu artinya agama Bali bercampur Hindu, sedangkan Hindu Bali artinya hasil percampuran antara peradaban Hindu dengan peradaban Bali. Para intelektual organik 1920-an, memilih nama Hindu Bali.

Biarpun nama agama Hindu Bali sudah digunakan pada 1920-an, namun pada tahun 1930-an masih banyak orang yang tidak mampu memaknai agamanya, sehingga beralih ke agama lain, terutama Nasrani. Pada tahun 1931, sejumlah orang Bali dibaptis menjadi pemeluk agama Nasrani. Sejak itu terjadi perlawanan orang-orang Bali Hindu terhadap agama Nasrani dalam berbagai bentuk, antara lain dengan

dukan elite lokal. Lihat, Claire Holt, *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*, terj. R.M. Soedarsono, (Bandung: arti.line, 2000), hlm. 33

3 Gatra, “Samboengan Katerangan B.A. No. 29,” *Bali Adnjana*, No. 30, Rebo Kliwon 20 October 1926, Tahoen III, hlm. 3-4.

memberikan sanksi sosial dan budaya kepada orang-orang yang melakukan konversi agama (Lihat lebih jauh Wijaya, 2007). Perlawanan yang lebih halus, melalui media pemikiran terjadi tahun 1936. Hal itu terungkap dalam Bali Darma Laksana (BDL) di Singaraja.⁴ Dalam suatu persidangan BDL, muncul usulan supaya BDL mau membuat dan menerbitkan kitab suci.⁵ Akan tetapi keinginan ini tidak mudah diwujudkan, karena ada tiga tantangan, yaitu, posisi pendeta sebagai kepala agama, hubungan pendeta dengan *sisya* (jemaat) dan agama dalam kaitannya dengan *kewangsaan*, yang eksistensinya sudah diatur dalam lontar-lontar.⁶ Pada 1930-an muncul keinginan mendirikan sekolah guru agama, namun sulit dilaksanakan karena orang yang memiliki otoritas mengajarkan agama adalah para *sulinggih* brahmana, yang bekerja tanpa memperoleh gaji⁷ Muncul pula keinginan melakukan reinterpretasi terhadap perayaan hari raya Nyepi, tahun baru Çaka.⁸

Pada dekade 1940-an, relatif tidak muncul pemikiran progresif mengenai agama. Para intelektual organik yang memiliki kuasa berbicara memilih melakukan kolaborasi untuk mencapai kepentingan masing-masing. Perubahan baru tampak pada dekade 1950-an, dengan adanya tantangan dari kelompok Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia (KARI), yang memaksa para intelektual organik

4 Tujuan BDL lainnya, meningkatkan kemajuan kebudayaan Bali dalam arti seluas-luasnya. Lihat Patriot, "Bekerja Teroes," *Djatajoe*, No. 8, 25 Maart 1939, Th. 3, hlm. 238 dan "Statuten Anggaran Dasar," *Djatajoe*, 25 November 1936, Tahoen ka 1, hlm. 96.

5 Lihat lebih jauh, I Made Kodhana, "Notulen dari Congres B.D.L. jang pertama Vergadering tanggal 25 Juli 1937, di Clubhuis Pabean Singaradja," No. 10, Oktober 1938, hlm. 42.

6 I.B. Manoeaba, "Pertimbangan Oentoek Kitab Soetji," *Djatajoe*, No. 4, 25 November 1937, Th. Ka 2, hlm. 112-113.

7 "Siang berganti malam," *Djatajoe*, 25 Februari 1939, Th. 3, hlm. 214.

8 K.W.N., "Njepi," *Bhāwanāgara*, No. 8, Tahoen II, hlm. 117-119.

Bali untuk melakukan replikasi agama seperti yang akan diterangkan di bawah ini.

Penolakan KARI terhadap Agama Hindu Bali

Pada awal 1950-an para intelektual organik Bali berhadapan dengan Islam politik dalam KARI, yang hanya mengakui keberadaan Islam dan Kristen sebagai agama karena sudah memiliki nabi dan kitab suci, sedangkan agama Hindu yang tidak memilikinya hanya disebut sebagai aliran kepercayaan (Howe 2001:147). Para intelektual organik Bali mencoba mencari jalan keluar dengan menerjemahkan Tuhan Yang Maha Esa menjadi *Ida Sang Hyang Widhi*.⁹ Akan tetapi upaya itu tidak berhasil melunakkan hati KARI. Mereka ingin memperoleh penjelasan secara utuh tentang agama Bali. Pada 28 Desember 1950, utusan KARI datang ke Bali untuk mengajukan pertanyaan tentang nama agama, filsafat dan kepercayaan ketuhanan, keberadaan sekolah agama, dan nama kitab suci dan ritual. Pertanyaan yang menyangkut ritual terdiri dari pengertian bersembahyang pada hari *purnama* dan *tilem*, persembahyangan di *kemulan*, *pemerajan*, dan *pura* (Anandakusuma, 1966:84-85).

Semua pertanyaan utusan KARI dijawab satu persatu oleh I Gusti Bagus Sugriwa. Ia menjelaskan agama Hindu Bali tidak berbeda jauh dengan agama-agama yang sudah memperoleh pengakuan KARI (Anandakusuma, 1966:84-85; Stuart-Fox, 1991:35). Utusan KARI juga bertanya tentang kesulitan-kesulitan umat Hindu Bali. I Gusti Bagus Sugriwa menyebutkan ada empat macam kesulitan umat Hindu Bali,

9 J.L. Swellengrebel, "Some Religious Problems of Today," *Bali: Studies in Life, Thought, and Ritual*, J.L. Swellengrebel, et al., ed. (Amsterdam: The Royal Tropical Institute, 1960), hlm. 71-73.

yaitu, persoalan biaya upacara dan perbaikan *pura*,¹⁰ biaya penterjemahan kitab-kitab suci, tunjangan hidup untuk para *pedanda* dan *pemangku*, dan tidak adanya perwakilan umat Hindu dalam kantor-kantor urusan agama KARI. Sugriwa meminta supaya semua kesulitan itu segera ditangani oleh KARI (Anandakusuma, 1966:85).

Pembicaraan antara Sugriwa dan utusan KARI berkembang menjadi wacana yang sangat menakutkan para intelektual organik sehingga mendorong mereka untuk mendirikan organisasi-organisasi keagamaan.¹¹ Sebelumnya hanya ada sebuah organisasi keagamaan, yakni Paruman Para Pandita yang berdiri pada 9 Januari 1949.¹² Pada 31 Desember 1950, tiga hari setelah kedatangan perwakilan KARI, muncul *Majelis Hinduisme*, yang berazaskan Hinduisme.¹³ Pada awal 1951 muncul organisasi *Wiwadha Shastra Sabhha*, yang tujuannya untuk mempelajari dan mendiskusikan naskah-naskah agama.¹⁴ Pada pertengahan 1951 muncul organisasi Panti Agama Hindu Bali, di Singaraja. Organisasi ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang filsafat agama Hindu Bali, menyederhanakan upacara agama Hindu Bali, dan mengubah adat istiadat yang tidak sesuai dengan

10 Stuart-Fox (1991: 35), berpendapat bahwa biaya ini bukan untuk perbaikan Pura Besakih, melainkan untuk keperluan upacara dalam satu tahun.

11 Lihat, Ni Putu Diantari, "Gerakan Pembaruan Hindu: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Intelektual Hindu di Bali Tahun 1925-1958, Skripsi S1, belum dipublikasikan, untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Sejarah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1990, hlm. 58-95.

12 "Notulen Verslang (sic) dari Congress PPP di Singaradja pada tanggal 16 s/d 19 Nopember 1949, hlm. 2.

13 "Anggaran Dasar Madjelis Hinduisme," (Dokumen asli milik Sri Rsi Ananda Kusuma, Alm., foto copinya tersimpan di Trisadhanaputra (TSP) *Art and Science Writing*, Denpasar).

14 Lihat, Frederik Lambertus Bakker, *The Struggle of the Hindu Balinese Intellectuals: Developments in Modern Hindu Thinking in Independent Indonesia* (Amsterdam: VU University Press, 1993), hlm. 227.

perkembangan zaman.¹⁵

Pada 10 Juni 1951 para pimpinan organisasi keagamaan mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan hasil pertemuan antara I Gusti Bagus Sugriwa dengan perwakilan KARI. Mereka sepakat untuk mengirimkan mosi (keputusan rapat) kepada Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta, anggota parlemen yang beragama Hindu dengan permintaan supaya ikut membela; dan Gubernur Sunda Kecil di Singaraja dengan permohonan untuk mendapat perhatian (Anandakusuma, 1966:85-86). Mosi itu berisi empat tuntutan, yaitu penempatan wakil-wakil agama dalam kantor-kantor agama, pembentukan panitia penyusunan kitab ajaran agama Hindu Bali, tunjangan biaya hidup untuk para *pedanda* dan *pemangku*, dan sumbangan dana antara lain untuk keperluan upacara keagamaan, pemeliharaan *pura-pura* utama, dan memajukan kesenian. Keempat tuntutan ditolak oleh KARI (Anandakusuma, 1966:85-87).

Penolakan KARI atas tuntutan para intelektual organik Bali, dipertegasakan oleh sikap Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Sunda Kecil.¹⁶ Mereka tetap mempertahankan susunan personalia KUA Provinsi Sunda Kecil yang mayoritas beragama Islam. Para intelektual organik Bali menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi keagamaan di Provinsi Sunda Kecil. Akan tetapi, pimpinan KUA Propinsi Sunda Kecil tidak menghiraukan keluhan yang disampaikan para intelektual

15 “Anggaran Dasar Panti Agama Hindu Bali,” (Dokumen asli milik Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus, Alm., fotonya copinya tersimpan di Trisadhanaputra (TSP) *Art and Science Writing*).

16 Kantor Urusan Agama Propinsi Sunda Kecil, membawahi Kantor Urusan Agama Daerah, yang berdiri disetiap kabupaten, yang wilayahnya merupakan bagian Propinsi Sunda Kecil, yaitu Bali, NTB, dan NTT. Kantor Urusan Agama Daerah membawahi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang berdiri dalam setiap kecamatan dalam wilayah suatu kabupaten.

organik.¹⁷

Melihat kondisi di atas, I Made Wedastera Suyasa beradu argumentasi dengan Sekretaris Jendral KARI mengenai status agama Bali. Ia mengkritik cara kerja pejabat KARI dan menuduh mereka tidak mengetahui, bahwa semua agama di Indonesia mempunyai kepercayaan yang mutlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wedastera Suyasa juga membicarakan cita-cita politik RI. Ia berpendapat, cita-cita politik RI yang berdasarkan ketuhanan harus dengan tegas membedakan antara negara dan agama. Persoalan agama, menurut Wedastera Suyasa, bukan urusan negara. Negara harus menjadi pelindung agama berdasarkan keadilan dan pengawasan, supaya semua manusia yang beragama di Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan perasaan tentram.¹⁸

Reaksi Terhadap Wacana Pendirian Negara Islam Indonesia

Memasuki tahun 1953, bersamaan dengan perjuangan memperoleh pengakuan agama Bali, muncul pula wacana berdirinya Negara Islam. Indikasinya terungkap dalam *Rubrik Obor Mimbar Indonesia* 3 Januari 1953.¹⁹ Wacana pendirian Negara Islam Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan intelektual organik Bali. Hal itu dapat dilihat dari reaksi I Gusti Bagus Sugriwa pada 20 Februari 1953. Ia berpendapat, dalam azas undang-undang negara RI, tidak tercantum sebutan agama, melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sebutan itu, menurut Sugriwa, semua agama di

17 Lihat, "Komentor Peristiwa Daerah: Kegelisahan Dewan Perwakilan Daerah Bali di Sekitar Kantor Urusan Agama Daerah," *Bhakti*, No. 7, Tahun II, 1 Maret '53, hlm. 4.

18 Lihat, Wedastera Suyasa "Agama Hindu Bali Terancam," *Bhakti*, Th. 1, 15 September 1952.

19 I Gst. Bgs. Sugriwa, "Rasa-tjinta terhadap kesatuan-bangsa," *Damai*, No. 3, Tahun ke- I, 17 Mei 1953, hlm. 3.

wilayah RI sudah termasuk di dalamnya.²⁰

Reaksi para intelektual organik Bali terhadap wacana negara Islam, ditanggapi oleh seorang intelektual organik Islam, K.H. Abdul Wahab. Ia berpendapat, Nasionalisme adalah kebangsaan yang berisikan agama, contohnya di Pakistan dan Arab. Redaktur *Bhakti* menanggapi pernyataan itu, bahwa nasionalisme adalah kebangsaan dan tidak benar jika isinya agama, apalagi agama Islam. Nasionalisme dan agama harus dipisahkan, sebab Indonesia bukan Pakistan maupun Arab. *Bhakti* mengakui, umat Islam di Indonesia memang mayoritas, namun kebesarannya tidak bulat, karena itu harus dipilih antara agama atau nasionalisme. Agama dan nasionalisme tidak mungkin dipersatukan, sebab masing-masing mempunyai pengaruh dan pegangan yang kuat pada diri manusia.²¹

Artikel *Bhakti* di atas menjadi pemicu perdebatan antara intelektual organik Bali melawan sesamanya dari kalangan Islam politik. Pada 1 Februari 1954, seorang intelektual organik Islam dari Jakarta menulis sebuah artikel dalam *Bhakti*, yang berisikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan terhadap Islam.²² Seorang intelektual organik KARI menyatakan setuju dengan pendapat *Bhakti* maupun Abdul Wahab, karena masing-masing menyoroti persoalan dari sudut agama masing-masing. Pangkal persoalannya, karena memang ada perbedaan isi dan jiwa antara Islam dan Hindu Bali. Dalam Qur'an dan Sabda yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, diatur soal-soal kenegaraan dan kemasyarakatan, sedangkan dalam Hindu

20 I Gst. Bgs. Sugriwa, "Rasa-tjinta terhadap kesatuan-bangsa," *Damai*, No. 3, Tahun ke- I, 17 Mei 1953, hlm. 3.

21 "Nasional dan Agama Tidak dapat Dipisahkan," *Bhakti*, No. 27, Tahun II, 17 Oktober 1953, hlm. 2.

22 "Reaksi Dari Djakarta: R.I. Berdasarkan Islam Mendjamin Kemerdekaan Agama Dan Kebudajaan Lainnja?," *Bhakti*, No. 3 1 Februari 1954, hlm. 8.

Bali tidak. Oleh karena itu, menurut intelektual organik KARI, dalam konsepsi Islam, Nasionalisme dan Islam tidak dapat dipisahkan.²³

Pada bulan Maret 1954, Sutrisna Sangging, seorang intelektual organik Bali melibatkan diri dalam perdebatan. Ia tidak sepakat dengan argumentasi intelektual organik KARI, karena dianggap bertentangan antara isi dengan jiwanya, karena mereka belum mampu memahami perbedaan antara Universalisme, Internasionalisme, dan Nasionalisme.²⁴ Pendapat Sutrisna Sangging di atas, didukung oleh majalah *Bhakti*, yang berpendapat, bahwa umat Islam belum memiliki kesatuan pandang tentang Nasionalisme dan agama. Menurut *Bhakti*, orang Islam sudah melewati batas-batas nasionalisme, karena mereka hanya dapat berdekatan melalui agama. Orang-orang Islam, menurut *Bhakti*, menyebut orang lain sebagai kafir sekalipun satu kebangsaan, hanya karena berbeda agama.²⁵

Menyangkut persoalan Pancasila, perdebatan dipicu oleh pernyataan *Bhakti* 17 Oktober 1953, yang antara lain menyebutkan, bahwa tanpa Pancasila makna kemerdekaan Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pancasila, dalam pandangan *Bhakti*, dapat menjamin kesejahteraan individu, membentuk dan membina masyarakat yang adil dan makmur, mengembangkan kebudayaan Bali, serta menghidupkan ekonomi rakyat dan keadilan sosial.²⁶ Pendapat ini ditanggapi oleh intelektual organik KARI pada Februari

23 Redaktur *Bhakti* memang tidak menyebutkan, bahwa artikel yang diturunkannya, sebagai dukungan terhadap Sutrisna Sangging, namun kecenderungan ke arah itu sulit dipungkiri. *Bhakti*, No. 3 1 Februari 1954, hlm. 8.

24 Sutrisna Sangging, "Sambutan atas Reaksi...", *Bhakti*, No. 3 1 Februari 1954, hlm. 9.

25 "Reaksi Dari Djakarta: R.I. Berdasarkan Islam Mendjamin Kemerdekaan Agama Dan Kebudayaan Lainnya?," *Bhakti*, No. 3 1 Februari 1954, hlm. 8.

26 *Bhakti*, No. 3 1 Februari 1954, hlm

1954, bahwa umat Islam pasti tidak akan menghilangkan Pancasila, melainkan hanya menginginkan pelaksanaannya dilakukan secara konsekuen. Dalam pandangan intelektual organik KARI, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, mempunyai konsekuensi bahwa pedoman undang-undang, peraturan, dan hukum negara seharusnya berdasarkan firman dan sabda Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Berbagai Bentuk Perjuangan Melawan KARI

Selain melalui perdebatan, perlawanan para intelektual organik Bali dan elite birokrasi pemerintah daerah Bali terhadap kelompok Islam politik juga dilakukan dengan cara mendirikan Kantor Urusan Agama Daerah (kabupaten) Otonom, sebagai tandingan Kantor Urusan Agama Daerah (kabupaten) yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama Provinsi Sunda Kecil.²⁸

Keberhasilan mendirikan KUA Daerah Otonom ternyata belum menyelesaikan persoalan Hindu dengan KARI. Masih ada satu persoalan lain yang belum terselesaikan yakni apakah agama Bali betul-betul agama atau bukan? Para intelektual organik Bali terpecah dua dalam menanggapi persoalan ini, yakni kelompok pesimis dan optimis.²⁹

Kelompok optimis memperjuangkan pengakuan agama Hindu dengan cara mengundang Pedanda Made Kemenuh, Ketua Paruman Para Pandita (PPP) untuk memberikan ceramah keagamaan pada 2 Juli 1953 di asrama putri Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP), Jakarta. Dalam ceramah ini,

27 "Reaksi Dari Djakarta: R.I. Berdasarkan Islam Mendjamin Kemerdekaan Agama Dan Kebudayaan Lainnja?," *Bhakti*, No. 3 1 Februari 1954, hlm. 6-7.

28 Lihat Merta, "Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Bali 3 Tahun," *Bhakti*, No. 24, tahun II, 15 September '53, hlm. 4.

29 Ida Bagus Dirgahayu, "Agama Hindu Bali Terantjam," *Bhakti* 10 Nopember '52, Tahun I, hlm. 13-14.

Pedanda Made Kemenuh menerangkan asal mula agama Bali Hindu, menerangkan tentang Tuhan Yang Maha Esa, *syahadah* (lambang), nabi, buku suci, dan pelaksanaan agama Hindu Bali.³⁰ Menurut Pedanda Made Kemenuh, agama Hindu berasal dari kata Sindu yang berarti kesucian. Akan tetapi, orang-orang Bali menyebut agama Hindu sebagai agama Çiwa Buddha atau agama Tirta. Pemeluk agama Hindu-Bali memang menyembah banyak dewa, bukan berarti mengakui paham *politheisme*, sebab agama Hindu-Bali juga mengenal Tuhan Yang Maha Esa yang disebut *Sanghyang Embang* atau *Sanghyang Widhi*. Agama Hindu-Bali memiliki *Syahadah* yang disebut *Pacaradan* (lambang, *credo*) yakni "*Aum Tat Sat Ekamewadwityam*" yang artinya *Sanghyang Widhi* maha sempurna, hanya satu tidak ada duanya. Agama Hindu, menurut Pedanda Kemenuh juga memiliki nabi, yaitu Bhagawan Viasa (putra dari Bhagawan Parasara dan Dewi Satiawati) yang dilahirkan di Delta Sungai Gangga, India. Agama Hindu menurut Pedanda Kemenuh juga memiliki kitab suci, yaitu Lontar *Sarasamuscaya*, yang berisikan ajaran-ajaran *Asta Dasa Parwa*.³¹

Pedanda Kemenuh juga menjelaskan, bahwa agama Hindu Bali memiliki sistematika atau aturan tentang pelaksanaan ajaran agamanya, lengkap dengan hari rayanya. Pelaksanaan ajaran agama Hindu menurut Pedanda Kemenuh disebut *Dharma* yang terdiri dari *Sila* dan *Yadnya*. *Sila* dimaksudkan sebagai petunjuk tingkah-laku manusia³² dan *yadnya* adalah pengabdian dan penghormatan terhadap Tuhan,

30 Redaktur Keliling Kita, "Mendengarkan Tjramah Keagamaan," *Bhakti*, Th. II. 1 September 1953, hlm.20.

31 Redaktur Keliling Kita, "Mendengarkan Tjramah Keagamaan," *Bhakti*, Th. II. 1 September 1953, hlm.20.

32 Sila terdiri dari sepuluh elemen disebut *dasa sila*, yakni *Ahimsa*, *Brahmacarya*, *Satya*, *Awiawahara*, *Astea*, *Akroda*, *Gurususrusa*, *Sotya*, *Aharalagawa* dan *Apramada*. *Ibid*.

nenek moyang, sesama manusia, dan binatang (hewan). Sama dengan agama lain, agama Hindu Bali juga memiliki hari raya yaitu *Nyepi, Pagerwesi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati*.³³

Perjuangan yang dilakukan melalui polemik dan ceramah keagamaan, ternyata tidak berhasil menggugah hati kelompok Islam politik dalam KARI yang mengakibatkan arah perjuangan para intelektual organik semakin agresif. Organisasi keagamaan bergabung melakukan gerakan aksi bersama di seluruh Indonesia. Gerakan aksi bersama seuruh Indonesia dikoordinir oleh I Gusti Ketut Kaler dari Dinas Agama, sedangkan untuk tingkat Bali oleh Ida Bagus Dhoster dan Ida Bagus Anom Suana, keduanya intelektual organik dari kelompok *triwangsa*. Gerakan aksi bersama juga dilakukan dengan cara memberikan kekuatan dan dukungan yang nyata kepada tuntutan delegasi yang dikirim oleh pemerintah Bali ke Jakarta. Dukungan dilakukan dengan cara mengirim telegram dan surat kilat kepada semua pejabat negara, yang berisikan empat tuntutan, yakni, segera mengadakan bagian Hindu Bali di dalam KARI, jangan bubarkan Kantor Urusan Agama Daerah Otonom, hapuskan KARI atau ditinjau kembali struktur dan organisasinya dan berikan perlakuan yang sama kepada semua agama di Indonesia, berikan keadilan, perikemanusiaan dan perlindungan, bimbingan dan perlakuan yang sama terhadap semua agama.³⁴

Akhirnya, pada 29 Juni 1958 lima orang pimpinan organisasi keagamaan dan sosial di Bali menghadap Presiden Sukarno di Istana Tampaksiring, Gianyar, untuk mempertegas tuntutan pencantuman agama Hindu Bali sebagai bagian dari

33 Redaktur Keliling Kita, "Mendengarkan Tjeramah Keagamaan," *Bhakti*, Th. II. 1 September 1953, hlm.20.

34 Redaktur Keliling Kita, "Mendengarkan Tjeramah Keagamaan," *Bhakti*, Th. II. 1 September 1953, hlm.20.

KARI.³⁵ Mereka membacakan tuntutan umat Hindu yang terdiri dari dua bagian, yaitu, meminta Presiden Soekarno memperhatikan permohonan seluruh umat Hindu Bali supaya agama Hindu Bali diberikan kedudukan sebagai bagian di KARI dan menggunakan wibawanya kepada para pejabat KARI, sehingga tuntutan seluruh umat Hindu dapat terpenuhi (Anandakusuma, 1966:103). Tuntutan ini dipenuhi oleh Sukarno melalui Surat Keputusan Menteri Agama 5 September 1958 Nomor 2, tentang bagian Hindu Bali dalam KARI.

Selanjutnya, masih pada bulan Juni 1958, melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, Pemerintah Bali mengusulkan tiga orang yang diangkat sebagai pemegang jabatan Kepala Bagian Hindu Bali dalam KARI. Mereka adalah I Njoman Kadjeng (pegawai di Kantor Provinsi Nusa Tenggara di Singaraja), I Gusti Gde Raka, mantan menteri, Oka Diputhera, seorang *upasaka* (penganut agama Buddha), seorang mahasiswa di Yogyakarta. Gerakan Kumara Bhavana memberikan dukungan kepada ketiga calon pejabat dalam jajaran KARI itu dan mengharapkan supaya mereka dapat bekerja, berjuang, dan berkorban untuk kepentingan umat.³⁶

Pasca-Pengakuan Agama Hindu oleh KARI

Lahirnya Parisada

Pada 7 Oktober 1958 delegasi ini dikirim oleh Pemerintah Daerah Bali untuk memperjuangkan pengakuan agama Hindu oleh KARI tiba di Bali. Mereka memberikan keterangan tentang

35 Kelima orang itu adalah Pedanda Gde Made Kemenuh (Paruman Para Pandita), I Gusti Ananda Kusuma (Satya Hindu Darma di Denpasar), Ida Bagus Wajan Gede (Yayasan Dwijendra di Denpasar), Ida Bagus Dosther (Angkatan Pemuda Hindu Bali di Denpasar), dan I Ketut Kandia (Panti Agama Hindu Bali) (Anandakusuma, 1966:102).

36 "Dewan Pimpinan...Surat No. 5300/dpn/58...", *loc. cit.*

hasil perjuangannya di Balai Masyarakat Denpasar.³⁷ Dalam pertemuan itu, Kepala Daerah Bali, Anak Agung Bagus Sutedja menunjuk sebuah panitia yang bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah dewan agama Hindu Bali.³⁸ Dewan agama Hindu Bali direncanakan akan bertugas menampung dan merumuskan segala sesuatu mengenai keagamaan Hindu Bali yang akan dijadikan sebagai bahan-bahan atau saran-saran dalam menjalankan bagian agama Hindu Bali dalam KARI. Dewan ini juga akan membantu serta mendampingi pemerintah dan pejabat-pejabat agama Hindu Bali dalam KARI.³⁹

Sidang *pesamuhan agung* peresmian Hindu Bali Sabha dipimpin oleh ketua panitia persiapan pembentukan dewan agama Hindu Bali, Ida Bagus Mantra. Sidang ini menghasilkan sebuah keputusan, mendirikan suatu dewan (majelis) yang diberi nama Parisada Dharma Hindu Bali. Pergantian nama Hindu Bali Sabha menjadi Parisada Dharma Hindu Bali merupakan suatu fenomena yang menandakan terjadinya pergeseran dari semangat demokratis ke eksklusivisme. *Sabha* artinya pertemuan, masyarakat terpendang, atau ruang dewan,⁴⁰ sehingga Bali Hindu Sabha sama artinya dengan Dewan Hindu Bali; sedangkan Parisada terdiri dari kata *pari* dan *sada*. *Pari* artinya perihal⁴¹ dan *sada* artinya selalu, setiap waktu, terus menerus atau *ajeg* (Zoetmoelder dan Robson,

37 Lihat kembali pembahasan subab **Reaksi Terhadap Wacana Pendirian Negara Islam Indonesia**.

38 “Dewan Pimpinan..., Surat No. 5300/dpn/58...,” *loc. cit.*

39 “Panitia Perantjang Hindu-Bali Sabha...,” *loc. cit.*

40 P.J. Zoetmoelder dan S.O. Robson, *Kamus Jawa Kuno – Indonesia*, terjemahan Darusuprta dan Sumarti Suprayitna (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ketiga, Juli 2000), hlm. 969.

41 Ni Luh Komang Candrawati (Ketua Penyunting), *Kamus Bali -Indonesia* (Denpasar: Balai Bahasa Denpasar, 2005), hlm. 538.

2000: 917). Dengan demikian, Parisada Dharma Hindu Bali bisa diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keabadian agama Hindu Bali.

Pergantian nama dari Bali Hindu Sabha menjadi Parisada Dharma Hindu Bali bisa dimaknai sebagai suatu bentuk “pertarungan” antara kelompok intelektual organik konservatif melawan yang progresif, antara kelompok yang menganut egaliterisme dengan eksklusivisme. Pada mulanya relasi-relasi kekuasaan ini tidak tampak ke permukaan, karena biarpun berubah nama, namun bentuknya tetap sama. Baik dalam nama lama maupun baru, lembaga itu sama-sama berbentuk sebuah majelis, dewan atau rapat yang mengemban tugas, bukan hanya mempertahankan, tetapi juga mengembangkan agama Hindu Bali. Demikian juga sifatnya, sama-sama mengusung keagamaan Hindu Bali (Anandakusuma, 1966:103).

Politik Kebudayaan

Pada tanggal 17–23 November 1961. PHDI menyelenggarakan *pesamuhan agung* bertema *Dharma Açrama Para Sulinggih dan Para Walaka Hindu Bali* di Campuan Ubud. Kongres ini melahirkan suatu keputusan yang disebut *Piagem Campuan 1961*. Dalam *piagem* itu disebutkan ada dua kewajiban utama umat Hindu Bali yaitu *dharma agama* dan *dharma negara*. *Dharma agama* terdiri dari sebelas kewajiban, yaitu, kitab-kitab acuan dalam bertindak, pengadaan *asrama pengadyayan* atau perguruan tinggi keagamaan, menetapkan segala syarat pendidikan dalam perguruan tinggi keagamaan setelah memperoleh pertimbangan dari Dinas Agama Hindu Bali, mendirikan *padmasana* dalam setiap pura *kahyangan tiga*, menetapkan dasar-dasar *pengalantaka* yang dinyatakan dalam kalender, menetapkan pelaksanaan *atiwa-tiwa*, tidak membedakan upacara kematian berdasarkan penyebabnya,

cuntaka hanya berlangsung selama tiga hari sesudah upacara pembakaran mayat, pergantian tahun *Çaka* pada tanggal satu bulan *caitra*, memperkokoh agama *Hindu Bali* dengan cara melaksanakan *sambang semadi Ciwa Ratri* pada *prawaning tilem sasih* pada bulan ketujuh dan sedapat mungkin dilakukan di *kahyangan-kahyangan* atau di *pura-pura*, dan terakhir, para *sulinggih* dan *walaka* diharapkan setiap saat memberikan penerangan hasil *pesamuhan agung* ini dan melakukan *dharma sasana* (Anandakusuma, 1966:16-17).

Sementara, dalam *Dharma Negara Piagem 1961*, disebutkan tujuh hal yang wajib dilaksanakan oleh agama (umat) Hindu Bali untuk kepentingan negara, yaitu, mendukung tindakan pemerintah mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Republik Indonesia, menyesalkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk pemusnahan peradaban dan pemusnahan makhluk Tuhan, mendesak pihak-pihak yang terkait supaya memperjuangkan pengajaran agama Hindu di sekolah-sekolah, mendesak pemerintah pusat untuk meninjau keberadaan Dinas Agama Otonom Daerah Bali, meminta supaya umat Hindu Bali mempertahankan semangat gotong royong terhadap *kahyangan* dan tempat persembahyangan umat Hindu Bali lainnya, membenarkan anggota ABRI dan petugas-petugas negara lainnya berpakaian seragam menurut peraturan masing-masing kesatuan saat melakukan persembahyangan di *pura*, *kahyangan*, dan tempat-tempat suci lainnya, dan terakhir, memandang perlu penyelenggaraan *pesamuhan agung* keagamaan secara berkala.⁴²

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas “struktur dalam” agama Bali yang terdiri dari pemujaan terhadap leluhur dan

42 I Gusti Ngurah Bagus, “Hubungan..,” *op. cit.*, hlm. 17-18.

kekuatan-kekuatan alam semesta tetap *Ajeg*, tidak mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada struktur luar, yang meliputi lambang, nabi, buku suci, dan pelaksanaan agama Hindu Bali. Unsur-unsurnya diambil bukan dari agama Bali melainkan agama Hindu. Pengambilan unsur-unsur Hindu yang tersimpan di dalam lontar-lontar tampak jelas sangat dipengaruhi oleh adanya tantangan dari Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Mahaesa dan intelektual organik Islam dalam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dengan demikian, agama Hindu Bali, yang kemudian dikenal sebagai Hindu dan selanjutnya Hindu Dharma adalah sebuah artikulasi. Sebagai sebuah artikulasi, karena itu, agama Hindu dapat disebut sebagai *invented tradition*,⁴³ artinya, agama yang ditemuipertakan, dibangun, dan diwujudkan secara resmi, dan agama yang muncul dalam waktu relatif singkat, yang dalam beberapa tahun saja dianggap sebagai agama yang mapan. Sebagai *Invented tradition*, agama Hindu bisa juga adalah agama yang diatur oleh peraturan-peraturan yang diakui secara tersurat maupun tersirat dan kegiatan yang bersifat ritualistik atau simbolis, yang bertujuan untuk menanamkan kelakuan-kelakuan kehinduan dan kebalian dengan cara diulang-ulang, yang secara otomatis mencerminkan kesinambungan masa lampau di masa kini.⁴⁴

DAFTAR PUSTAKA

Anandakusuma, I.G.R., 1966. *Pergolakan Hindu Dharma II* Denpasar: Pustaka Balimas.

43 Adanya bentuk-bentuk *Invented tradition* dalam kebudayaan Bali semakin memperkuat pendapat Adrian Vickers, bahwa “Bali adalah Sorga Yang Diciptakan.” Lihat Adrian Vickers, *Bali a Paradise Created* (California: Periplus, 1989).

44 Dikembangkan dari pemikiran Eric Hobsbown and Terence Ranger, ed., *The Invention of Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), hlm. 1-3.

“Anggaran Dasar Panti Agama Hindu Bali,” (Dokumen asli milik Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus, Alm., fotonya copinya tersimpan di Trisadhanaputra (TSP) *Art and Science Writing*).

“Anggaran Dasar Madjelis Hinduisme,” (Dokumen asli milik Sri Rsi Ananda Kusuma, Alm., foto copinya tersimpan di Trisadhanaputra (TSP) *Art and Science Writing*, Denpasar).

Diantari, Ni Putu, 1990. “Gerakan Pembaruan Hindu: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Intelektual Hindu di Bali Tahun 1925-1958, Skripsi S1, belum dipublikasikan, untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Sejarah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Dirgahayu, Ida Bagus “Agama Hindu Bali Terantjam,” *Bhakti* 10 Nopember '52, Tahun 1.

Gatra, “Samboengan Katerangan B.A. No. 29,” *Bali Adnjana*, No. 30, Rebo Kliwon 20 October 1926, Tahoen III.

Gora Sirikan, 1956. *Pulau Bali dalam Masa-Masa yang Lampau*, Jilid I, Gianyar: Tanpa Penerbit.

Hobart, Mark, 2000. *After Culture Anthropology as Radical Metaphysical Critique*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000.

Hobsbown, Eric and Terence Ranger, ed., 1983. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Howe, Leo, 2001. *Hinduism & Hierarchy in Bali*. New Mexico: School of American Research Press.

Holt, Claire, 2000. *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*, terj. R.M. Soedarsono. Bandung: arti.line.

Kodhana, I Made. “Notulen dari Congres B.D.L. jang pertama Vergadering tanggal 25 Juli 1937, di Clubhuis Pabean Singaradja,” No. 10, Oktober 1938.

Komang Candrawati, Ni Luh (Ketua Penyunting), 2005. *Kamus Bali –Indonesia*. Denpasar: Balai Bahasa Denpasar.

“Komentar Peristiwa Daerah: Kegelisahan Dewan Perwakilan Daerah

Bali di Sekitar Kantor Urusan Agama Daerah," *Bhakti*, No. 7, Tahun II, 1 Maret '53.

K.W.N., "Njepi," *Bhāwanāgara*, No. 8, Tahun II.

Laclau, E., 1990. *New Reflections on The Revolution of Our Time*. London: Verso.

Lambertus Bakker, Frederik, 1993. *The Struggle of the Hindu Balinese Intellectuals: Developments in Modern Hindu Thinking in Independent Indonesia*. Amsterdam: VU University Press.

Manoeaba, I.B. "Pertimbangan Oentoek Kitab Soetji," *Djatajoe*, No. 4, 25 November 1937, Th. Ka 2.

Merta, "Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Bali 3 Tahun," *Bhakti*, No. 24, tahun II, 15 September '53.

"Nasional dan Agama Tidak dapat Dipisahkan," *Bhakti*, No. 27, Tahun II, 17 Oktober 1953.

"Notulen Verslang (sic) dari Congress PPP di Singaradja pada tanggal 16 s/d 19 Nopember 1949.

Pandit Shastri, N. D, 1963. *Sejarah Bali Dwipa, Jilid I*. Denpasar: Bhuvana Saraswati.

Patriot, "Bekerdja Teroes," *Djatajoe*, No. 8, 25 Maart 1939, Th. 3.

"Reaksi Dari Djakarta: R.I. Berdasarkan Islam Mendjamin Kemerdekaan Agama Dan Kebudajaan Lainnja?," *Bhakti*, No. 3 1 Februari 1954.

Redaktur Keliling Kita, "Mendengarkan Tjeramah Keagamaan," *Bhakti*, Th. II. 1 September 1953.

Sartono Kartodirdjo, *et al.*, 1975. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

"Statuten Anggaran Dasar," *Djatajoe*, 25 November 1936, Tahun ka 1.

Stuart-Fox, David J. 1991. "Pura Besakih: Temple-state relations from precolonial to modern times," dalam H. Geertz *State and*

Nyoman Wijaya

Society in Bali, Leiden: KITLV.

Swellengrebel, J.L. 1960. "Some Religious Problems of Todyas," *Bali: Stuidies in Life, Thought, and Ritual*, J.L. Swellengrebel, et al., ed. (Amsterdam: The Royal Tropical Institute.

"Siang berganti malam," *Djatajoe*, 25 Februari 1939, Th. 3.

Sugriwa, I Gst. Bgs. "Rasa-tjinta terhadap kesatuan-bangsa," *Damai*, No. 3, Tahun ke- I, 17 Mei 1953.

Vickers, Adrian, 1989. *Bali a Paradise Created*. California: Periplus.

Wedastera Suyasa "Agama Hindu Bali Terancam," *Bhakti*, Th. 1, 15 September 1952.

Wijaya, Nyoman, 2007. *Serat Salib dalam Lintas Bali: Sejarah Konversi Agama di Bali 1931-2001*. Denpasar: TSPbooks.

Zoetmoelder, P.J. dan S.O. Robson, 2000. *Kamus Jawa Kuno – Indonesia*, terjemahan Darusuprta dan Sumarti Suprayitna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.